

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI MELALUI METODE E-WARUNG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Faridah¹, Novi Rahayu², Romdana³, Dian Forensa⁴

¹²³⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

farida@stiabengkulu.ac.id, novirahayu@stiabengkulu.ac.id,

romdana@stiabengkulu.ac.id

Received: 27-12- 2023

Revised: 30-12-2023

Approved: 05-01-2024

RINGKASAN

Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu program yang dikeluarkan pemerintah sebagai tindak lanjut dalam mengatasi mata rantai kemiskinan. Pada tahun 2017, yang telah diatur pada kementerian sosial No. 11 Tahun 2018 tentang program bantuan non tunai serta praturan presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Bantuan pangan non tunai (bpnt) yang bersumber dari Anggaran Pusat atau APBN. Kemudian dikelola oleh kementerian sosial dan dilimpahkan pada tingkat kabupaten/kota yang menjadi kewenangan daerah untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa proses pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui metode E-Warung dalam menanggulangi kemiskinan sudah dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan aturan yang dilihat dari aspek komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan pengamatan langsung kelokasi penelitian dan wawancara dengan para KPM (keluarga penerima manfaat). Masih ada kendala yang dihadapi pada tahap komunikasi atau sosialisasi karena masyarakat masih perlu adanya pengawasan sehingga masih ada masyarakat yang belum megetahui tentang mekanisme pelaksanaan bantuan. Dan sarana dan prasarana didesa padang ulak tanjung yang digunakan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) masih sangat kurang serta jarak antar rumah KPM dan E-Warung jauh sehingga menyebabkan KPM merasa kesulitan pada saat pengambilan bantuan.

Kata Kunci : Program Bantuan Pangan Non Tunai; E-Warung

PENDAHULUAN

Dalam sebuah Negara, Pemerintah Indonesia memiliki peran besar dalam kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah bertanggung jawab atas pangan yang cukup dan bermutu, sesuai dengan kemampuan dan kesangupan masyarakatnya. Negara bertanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan sistem jaminan sosial yang dilandasi oleh konstitusi baik secara internasional maupun nasional (Suharto, 2005:156). Karena jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia memiliki banyak masalah – masalah yang ada di masyarakat, diantaranya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang dihadapi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan - keadaan dimana individu/kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup ekonomi.

Berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa “ fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara “ serta pasal 2 “ negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

manusia “ dalam pelaksanaannya, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dengan cara mengeluarkan program-program sosial. Salah satu program yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu program yang dikeluarkan pemerintah sebagai tindak lanjut dalam mengatasi mata rantai kemiskinan. Pada tahun 2017, yang telah diatur pada kementerian sosial No. 11 Tahun 2018 tentang program bantuan non tunai serta praturan presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Bantuan pangan non tunai (bpnt) yang bersumber dari Anggaran Pusat atau APBN. Kemudian dikelola oleh kementerian sosial dan dilimpahkan pada tingkat kabupaten/kota yang menjadi kewenangan daerah untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Awalnya, program BPNT merupakan pengganti program Beras Sejahtera (Rastra) yang bermasalah. Penggantian program Rastra dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di karena munculnya berbagai dinamika dimana banyaknya kritik yang masuk dari masyarakat penerima Raskin atau Rasta, yang mana kualitas dari beras yang buruk, dampaknya terhadap pasar beras lokal dan penentuan sasaran program yang tidak efektif. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Disalurkan secara non tunai kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme rekening elektronik. Hanya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dari tempat yang telah berkerjasama dengan bank Himbara atau sering disebut dengan E-Warung.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan pemerintah kepada KPM tanpa uang tunai setiap bulan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) awalnya akan menerima 110.000 rupiah. / KPM, setelah itu dilakukan penggandaan. yaitu 150.000 Rupiah dan saat ini menjadi 200.000/KPM per bulan melalui Mekanisme Rekening Elektronik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk membeli sembako di tempat yang bermitra dengan Himpunan Bank Negara (Himbara), biasa disebut dengan E-Warung. E-Warung (warung elektronik gotong royong) ialah penyalur bantuan non tunai bagi warga kurang mampu. Dengan sistem ini setiap bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai akan menggunakan sistem perbankan.(suci megawatt, 2020).

Desa Padang Ulak Tanjung adalah salah satu desa yang berada di kecamatan talang empat yang mendapatkan bantuan program bantuan pangan non tunai (BPNT), program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikeluarkan pada masa pandemi covid 19 dari tahun 2019 sampai sekarang dan memiliki jumlah penerima sebanyak 50 orang keluarga penerima manfaat (KPM) yang terbagi dalam tiga dusun desa padang ulak tanjung.

E-Warung (warung elektronik gotong royong) tidak hanya sebagai tempat penyaluran bantuan sosial membeli kebutuhan bahan pokok, E-warung juga berfungsi sebagai mini automatic teller machine (ATM) yang melayani pencairan belanja non tunai, buka tabungan, setoran dan tarik tunai, transfer, pembayaran listrik, telpon, BPJS, PAM, cicilan, tiket, token listrik bahkan pulsa.

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban ekonomi dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberikan bantuan sembako yang bermanfaat agar mereka dapat mengkonsumsi makanan yang tepat dan mendapatkan gizi yang baik. Tindakan yang dilakukan pemerintah melalui BPNT dapat

membantu meningkatkan perekonomian masyarakat rentan. Manfaat yang diterima masyarakat melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (bpnt) yaitu: 1). Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memenuhi kebutuhan pangannya. 2). Memberikan pola makan yang lebih seimbang kepada Keluarga Unggulan (KPM). 3). Penyempurnaan target dan waktu penerimaan bantuan sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 4). Memberikan pilihan dan kontrol keluarga yang disukai untuk memenuhi kebutuhan pembayaran.

Dalam kenyataannya tidak selamanya kebijakan publik itu mencapai sasaran setelah dilaksanakan, walaupun sudah dilaksanakan sedemikian rupa. Karena pada pelaksanaannya banyak sekali masalah yang muncul dengan berbagai hal yang kompleks, yang tidak mudah untuk dihilangkan. Sebagai sebuah rencana secara terpusat. Dalam pelaksanaannya terdapat aspek dan pihak yang terkait. Dalam kaitannya itu tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dari peraturan pada saat pelaksanaan program.(Wibawa Dkk, 1994).

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Bantuan Pangan non Tunai

Implementasi menurut Dunn (2003:132), ialah pelaksanaan penggadilan aksi – aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan yang telah dibuat dan direkomendasikan oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwasannya kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasinya.

Model implementasi kebijakan yang bersifat top-down yang dikembangkan oleh George C. Edward III dikenal dengan “direct and indirect impact on implementation” terdapat empat aspek - aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan public yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan public. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People”. Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “Staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies”. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator - indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005: 142-143) mengemukakan : “kecenderungan – kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para

pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

4. Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi - organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus - kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas".

Program Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial sembako yang disalurkan oleh pemerintah dalam bentuk non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Nama Fakir Miskin yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli makanan dari pedagang grosir atau disebut e-warung (warung koperasi elektronik) di tempat-tempat yang bekerjasama dengan bank penyalur. Salah satu program nontunai dari Program Bantuan Pangan (BPNT) adalah meringankan beban kebutuhan pangan masyarakat dan memberikan gizi seimbang yang cukup dan tepat waktu kepada Keluarga Sejahtera (KPM).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Pangan Sejenis (BPNT). Bantuan sembako (bpnt) yang diterima dari anggaran pusat atau APBN. Kemudian dikelola oleh Kementerian Sosial dan dilimpahkan ke tingkat kabupaten / kota, yang merupakan kewenangan daerah yang memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada penerima manfaat (KPM) setiap bulannya para keluarga penerima manfaat (KPM) menerima pada mulanya senilai Rp.110.000/ KPM, kemudian mengalami 2 kali kenaikan yakni Rp 150.000 dan sekarang ini sebesar 200.000/KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan bahan pangan ditempat yang telah bekerjasama dengan himpunan bank negara (Himbara) yang biasa disebut e-warung (suci Megawati, 2020).

Kriteria Penerima Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Penerima Manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial.

Data Penerima Manfaat (DPM) program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). Data Penerima Manfaat (DPM) program Sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

Penerima Manfaat

Penerima Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program BPNT dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial. DPM program BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG (<https://kemensos.go.id>) menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). Data Penerima manfaat (DPM) program BPNT yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

E-Warong

E-Warung (warung elektronik gotong royong) tidak hanya sebagai tempat penyaluran bantuan sosial membeli kebutuhan bahan pokok, E-warung juga berfungsi sebagai mini automatic teller machine (ATM) yang melayani pencairan belanja non tunai, buka tabungan, setoran dan tarik tunai, transfer, pembayaran listrik, telpon, BPJS, PAM, cicilan, tiket, token listrik bahkan pulsa.

Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-Warong dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di desa/kelurahan. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur.

Pengertian Kemiskinan

Secara harfiah Kamus besar Bahasa Indonesia, miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standard dan tingkat penghasilan dan ekonominya renda. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Tria & Praja, 2021, 4)

Kemiskinan merupakan ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Bank Dunia mengartikan kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. J. Friedman. (Haryati Roebyantho, dkk. 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Sugiyono, (2014;1) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengimplorasi, dan memahami pada makna yang oleh sejumlah

individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Teknik pemilihan informan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi, keterangan-keterangan yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan sampel yang dilakukan secara langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (bpnt) melalui metode e-warung dalam penggulungan kemiskinan di desa padang ulak tanjung.

Adapun untuk mengetahui data dan informasi mengenai pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (bpnt) melalui metode e-warung dalam penggulungan kemiskinan maka perlu adanya informan sebagai alat atau sumber informasi, informan yang diambil peneliti berjumlah 13 orang terdiri dari 4 orang perangkat desa 1 orang pendamping pelaksana 1 orang agen pemilik e-warung dan 7 orang masyarakat penerima manfaat program bantuan pangan non tunai (BPNT) desa padang ulak tanjung.

Teknik Pengumpulan dan Analisis data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah melalui: Observasi, Wawancara **dan** Dokumentasi

Sesuai dengan metode penelitian, Teknik analisis data yang dilakukan ialah teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, menyusunnya dalam satu-satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkan dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2006:247). Menurut Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2007:2430) ada dua macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dalam penelitian dengan mencari pola dan temanya hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Menurut Milles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa penyajiandata adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui metode E-Warung didesa padang ulak tanjung

Mekanisme pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (bpnt) melalui Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan melalui tahapan: (1). Registrasi atau pembukaan rekening (2). Edukasi dan sosialisasi (3). Penyaluran (4). Pembelian barang/pencairan

1. Registrasi atau pembukaan rekening

Registrasi atau pembukaan rekening keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan non tunai (BPNT) meliputi pembukaan rekening secara kolektif, Pencetakan kartu, Aktivasi, dan disrtibusi kartu keluarga sejahtera (KKS).

2. Edukasi dan sosialisasi

Edukasi dan soaialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana seperti dari Kementerian Sosial, Pendamping, Kecamatan atau Kelurahan, dan Aparat Desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilaksanakan secara tatap muka dengan materi atau sosialisasi tentang apa itu program bantuan pangan non tunai (BPNT), tujuan dan manfaat program BPNT, tata cara penggunaan kartu KKS, manfaat menabung dan perencanaan keuangan, tata cara penyampaian pengaduan dan kebijakan dari program BPNT.

3. Penyaluran

Proses penyaluran program BPNT dilaksanakan oleh bank penyalur kepada rekening e-wallet keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan non tunai (BPNT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan sebesar 110.000/bulan pada tahap awal pembentukan program BPNT kemudian terjadi kenaikan sebesar 150.000/bulan dan sekarang menjadi 200.000/bulan. Kemudian penyalur menyediakan peralatan kepada pelaksana penyalur bantuan pangan non tunai (BPNT) E-Warung yang meliputi mesin mini ATM dan kertas cetak reksi.

1. Pembelian barang/tahap pencairan

Pembelian barang/ tahap pencairan para KPM langsung datang ketempat agen pelaksana atau E-Warung dengan membawa kartu ATM merah putih kemudian dilakukan pengecekan saldo oleh agen E-Warung melalui mesin mini ATM jikalau terdapat saldo maka para KPM bisa membeli sembako berupa beras dan telur.

Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di E-Warung yang telah berkerjasama bank himbara. Dalam pelaksanan program bantuan pangan non tunai (BPNT) didesa padang ulak tanjung yang dilihat menggunakan teori implementasi oleh George C. Edward III dengan aspek -aspek (1). Kominikasi (2) Sumber Daya yang terbagi menjadi (a). Sumberdaya Manusia (b). Sarana dan Prasarana (3). Disposisi atau Sikap Para Pelaksana (4). Struktur Birokrasi.

Berdasarkan pengamatan langsung kelokasi penelitian dan wawancara dengan para KPM (keluarga penerima manfaat). Masih ada kendala yang dihadapi pada tahap komunikasi atau sosialisasi karena masyarakat masih perlu adanya pengawasan

sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan bantuan. Dan sarana dan prasarana didesa padang ulak tanjung yang digunakan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (bpnt) masih sangat kurang serta jarak antar rumah KPM dengan agen E-Warung jauh sehingga menyebabkan KPM merasa kesulitan pada saat pengambilan bantuan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen desa pada tahun 2022 -2023, keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang telah terdata didesa padang ulak tanjung sebanyak 50 kk yang terbagi dari dusun 1 sampai dusun 3, nama - nama yang terdata tersebut akan mendapatkan kartu ATM merah putih dengan syarat mengikuti sosialisasi dibalai desa, dengan mengumpulkan fotocopy KTP dan fotocopy KK, yang mana kartu tersebut adalah kartu yang digunakan dalam penyaluran BPNT ialah kartu keluarga sejahtera (KKS).

Kartu KKS berfungsi sebagai wallet uang elektronik sehingga pada saat pencairan bantuan wajib dibawa oleh KPM. Keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar 200.000 perbulannya yang digunakan untuk membeli kebutuhan bahan pokok di tempat yang telah berkerja sama dengan bank himbara yang biasa disebut E-Warung. Berdasarkan pengamatan langsung kelokasi penelitian dan wawancara dengan para KPM (keluarga penerima manfaat). Para keluarga penerima manfaat (KPM) mengatakan bahwa bantuan pangan non tunai (BPNT) ini sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat karena dengan adanya program bantuan pangan non tunai (BPNT) bisa mengurangi pengeluaran biaya pemenuhan kebutuhan pokok.

Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Metode e-Warung

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III dikenal dengan “direct and indirect impact on implementation” terdapat empat aspek - aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan public yaitu :

1. Komunikasi
Komunikasi merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan public. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.
2. Sumber Daya
Sumber Daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan . tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya.
3. Disposisi
Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan.
4. Birokrasi
Birokrasi merupakan sturktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan

birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi - organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.

1. Komunikasi

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disebarakan dengan jelas, akurat dan konsisten. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal ini Program BPNT memiliki tujuan yaitu untuk mengentas mata rantai kemiskinan melalui akses layanan berbasis E-Warung (elektronik warung gotong royong).

Berdasarkan pedoman umum program BPNT bahwa sosialisasi dan komunikasi program BPNT dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksana di pusat dan didaerah, kalangan media, LSM, akademisi, dan masyarakat. Termasuk peserta/ KPM (keluarga penerima manfaat) BPNT.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti kelokasi penelitian tampak bahwa komunikasi mengenai program BPNT yang disosialisasikan oleh pihak Tim koordinasi bantuan sosial di desa Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sudah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dilokasi penelitian ibu MS (umur 33 tahun), selaku pendamping program BPNT ia mengatakan

“Sebelum Berakhirnya program Rastra dan di bentuknya program BPNT itu di Sosialisasi/dikomunikasikan terlebih dahulu, tentang apa itu program BPNT, tujuan dari BPNT, dan manfaat yang diterima oleh masyarakat akan Program BPNT ini. Yang dihadiri oleh pihak desa atau lurah, camat, Tim koordinasi dan para KPM (keluarga penerima manfaat) yang dilaksanakan atau di Sampaikan oleh pihak kementerian sosial.” (**Hasil Wawancara dengan ibu MS pada tanggal 21 agustus 2023. Pukul 13: 45 Wib di desa padang ulak tanjung**).

Hal ini juga dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dikantor desa Padang Ulak tanjung bapak TD (umur 46 tahun), yang berasal dari perangkat desa selaku KASI KESOS ia mengatakan

“Iya ada sosialisasi tu pas awal-awal pelaksanaan program BPNT pada tahun 2019 terkait proses penyaluran program BPNT yang dihadiri oleh pihak Tim koordinasi, camat, para KPM juga aparat desa.” (**hasil wawancara dengan bapak TD pada tanggal 21 agustus 2023. Pukul 11.00 Wib dikantor desa Padang Ulak tanjung**)

Hal ini juga dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui di rumah ibu ZM (umur 48 tahun), selaku ketua kelompok KPM (keluarga penerima manfaat) ia mengatakan

“ya kami pernah mendapatkan sosialisasi tentang program BPNT pada saat dikumpulkan tu kami diberitahu untuk membawa KK dan KTP untuk pembuatan kartu ATM merah putih/ KKS (kartu keluarga sejahtera) yang tujuannya kami dikumpulkan tu di beri tahu tentang apa itu BPNT, tujuan BPNT, dan Proses cara

mengambil bantuan, tapi biasanya itu kan ada pertemuan setiap bulannya nah kalo di P.U.T ini nggak ada, ketika ada masalah misalnya pada saat ada KPM yang bantuannya belum cair itu kan biasanya nanya atau konsultasinya sama pendamping pada saat pertemuan tapi dikita tidak ada jadi merasa kurang pengawasan. (**Hasil wawancara dengan ibu ZM pada tanggal 21 agustus 2023, pukul 19:30 Wib , dirumah ibu ZM desa padang ulak tanjung**)

Hal ini juga dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui di rumah ibu NS (umur 54 tahun), salah satu KPM (keluarga penerima manfaat) ia mengatakan

“Penyampaian tentang Program BPNT ini dilakukan sama pendamping kemudian kami sebagai KPM (keluarga penerima manfaat) diberi penjelasan tentang program BPNT, asal mula BPNT, tujuan dan Manfaat BPNT dan pada saat kami dikumpulkan itu kami diminta untuk membawa KK dan KTP sebagai syarat pembuatan kartu ATM /kartu Keluarga Sejahtera (yang biasa disebut kartu merah putih) sebagai alat untuk mengambil bantuan. Tapi didusun kita ni nggak ada pertemuan yang biasanya dilakukan setiap bulan kayak didesa tetangga (**Hasil wawancara dengan ibu NS pada tanggal 22 agustus 2023, pukul 14:30 Wib, dirumah ibu NS desa padang ulak tanjung**)

Hal ini juga dibenarkan oleh informan peneliti yaitu pemilik E-Warung mbak SD (umur 28 tahun), ia mengatakan

“Program BPNT ini disosialisasikan/disampaikan oleh pendamping setiap desa atau kelurahan, kemudian kami sebagai agen pelaksana mempersiapkan bahan pangan atau kebutuhan pokok yang siap dibeli oleh KPM (keluarga penerima manfaat), pertama koordinasi itu kami sebagai agen diberi tahu kapan bantuan itu dicairkan/saldonya masuk kerekening KPM. Kalau sudah masuk saldonya kita hubungi KPM untuk pengambilan bantuannya. Ketika ada KPM yang nanya karena kartunya bermasalah itu kita memberi solusi untuk datang langsung kemensosnya karena di desa kita ini jarang mengadakan pertemuan yang biasanya dilakukan setiap bulan. (**Hasil wawancara dengan pemilik E-Warung dengan mbak SD pada tanggal 22 agustus 2023, pukul 09:30 Wib dirumah agen E-warung desa Padang Ulak Tanjung**)

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti kelokasi penelitian dan hasil wawancara dengan pendamping BPNT, aparat desa, ketua kelompok KPM, anggota KPM, dan agen E-Warung. Program BPNT sudah disosialisasikan dengan baik oleh stakeholders pemerintah dan diterima baik oleh masyarakat.

Komunikasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui E-Warung didesa padang ulak tanjung pada awal pelaksanaan program tidak terjadi miskomunikasi antar aktor dari tingkat Desa/Kelurahan. Karena sebelumnya pelaksanaan program dari Kementrian Sosial sudah memberikan sosialisasi yang cukup baik sebagai tujuan dan sasaran dari program bantuan pangan non tunai (BPNT). Hasil sosialisasi disampaikan kepada masyarakat penerima manfaat dijelaskan dan disampaikan secara jelas mengenai bantuan BPNT baik dari arti BPNT, tujuan dan manfaat BPNT, dan mekanisme cara pengambilan bantuan BPNT yang disalurkan melalui E-Warung agar masyarakat paham sehingga komunikasi antar organisasi terjalin dengan baik. Tetapi masih perlu ditingkatkan dan diperhatikan lagi dalam

proses penyampaian komunikasi atau sosialisasi nya karena masyarakat masih perlu adanya pengawasan sehingga ada yang masih belum paham akan mekanisme bantuan dan cara mengatasi masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program BPNT.

2. Sumber Daya

Sumber Daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan . tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Sumber daya merupakan kebarhasilan proses pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan fasilitas yang dapat mendorong dan mempelancar proses pelaksanaan yang efektif.

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan karena pelaksanaan kebijakan memerlukan sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tersebut.

Sumber daya manusia

Sumber daya manusia sangat diperlukan guna untuk memperlancar dalam proses pemilihan calon penerima bantuan, serta proses penyaluran bantuan di desa Padang Ulak Tanjung. Sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan melalui tenaga kerja yang menjalankan tugas dengan baik dan melakukan suatu bentuk kerjasama yang dapat memberikan hasil yang maksimal. Dalam hal ini pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertugas mengarahkan dan memotivasi, memberi masukan kepada anggota penerima manfaat program BPNT disebut Pendamping BPNT yang juga berkerjasama dengan pemerintah desa dan Agen Pelaksana (pemilik E-Warung).

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti kelokasi penelitian tampak bahwa sumber daya manusia sangat diperlukan guna untuk melancarkan proses penyaluran bantuan pangan non tunai didesa padang ulak tanjung. Dalam program ini, pemerintah desa, Pendamping dan agen pelaksana.

Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dilokasi penelitian ibu LZ (umur 37 tahun), selaku Sekretaris desa Padang Ulak tanjung ia mengatakan

“Kami selaku perangkat desa itu bertugas untuk mengelola arus data dan informasi seluruh warga desa P.U.T baik dari dusun 1 sampai dusun 3 kalo masalah bantuan BPNT ini kita mencari tau dulu tentang data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga. Yang dilakukan pendataan langsung kerumah warga oleh perangkat desa Bapak TD (kasih KESOS), setelah data sudah diperoleh kemudian kita akan mengirim data tersebut kepada pihak kementerian sosial melalui link yang disediakan oleh pihak kemensos karena bantuan ini datang nya dari kementerian sosial” ” **(Hasil wawancara dengan Sekretaris desa Ibu LZ pada tanggal 21 agustus 2023, pukul 11:30 Wib di kantor desa Padang Ulak Tanjung)**

Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dikantor desa Padang Ulak tanjung bapak TD (umur 46 tahun), yang berasal dari perangkat desa selaku KASI KESOS Padang Ulak tanjung ia mengatakan

“Perangkat desa harus mampu mengelola informasi terkait bantuan apa yang diberikan atau dikeluarkan dan kami juga harus bisa memberikan informasi yang

jelas kepada warga akan bantuan ini baik dari arti dari bantuan, tujuannya dan manfaatnya agar kami bisa memilih dan memilah warga yang benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan ini” (**hasil wawancara dengan bapak TD pada tanggal 21 agustus 2023. Pukul 11.00 Wib dikantor desa Padang Ulak tanjung**)

Hal ini juga dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dikantor desa Padang Ulak tanjung mbak SD (umur 28 tahun), agen E-Warung ia mengatakan

“kami sangat menyambut sekali dan aktif akan informasi yang diberikan oleh kementerian sosial akan bantuan pangan non tunai ini, saya selaku agen pelaksana atau agen E-Warung memiliki peran untuk mempermudah para KPM pemilik kartu merah putih untuk bisa mencairkan dana bantuannya karena bentuknya itu kartu ATM, E-Warung itu kan diberi fasilitas oleh BRI berupa bentuk mesin mini ATM yang berguna untuk mencairkan bantuannya. **wawancara dengan pemilik E-Warung dengan mbak SD pada tanggal 22 agustus 2023, pukul 09:30 Wib dirumah agen E-warung desa Padang Ulak Tanjung**)

Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dilokasi penelitian ibu MS (umur 33 tahun), selaku pendamping program BPNT ia mengatakan

“kami selaku pendamping itu bertugas untuk memberikan edukasi informasi kepada para KPM (keluarga penerima manfaat) tentang bantuan pangan non tunai tujuan manfaat dan mekanisme cara pengambilan bantuan itu sendiri. Kami juga mendapatkan pelatihan akan tugas dan tanggung jawab kami, misalnya kami menerima pengaduan dari masyarakat akan bantuan BPNT maka kami harus bisa memberi penyampaian solusi akan pertanyaan tersebut.”

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti kelokasi penelitian dan hasil wawancara dengan sekretaris desa, perangkat desa (kasi kesos), pendamping dan agen pelaksana program BPNT tampak dalam sumber daya manusia nya sudah terampil akan tugas dan tanggung jawab nya masing - masing dalam memilah dan memilih calon penerima manfaat.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, Sarana dan prasarana adalah sebagai alat penunjang dan umumnya merupakan fasilitas/peralatan yang memadai maka dengan adanya sarana dan prasarana maka akan mempermudah proses penyaluran suatu program (proses penyaluran bantuan pangan non tunai melalui metode e-warung).

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti kelokasi penelitian tanpa bahwa Sarana dan Prasarana sangat diperlukan guna untuk melancarkan proses penyaluran bantuan pangan non tunai didesa padang ulak tanjung.

Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dilokasi penelitian di warung agen pelaksana/E-Warung Mbak SD (umur 28 tahun), selaku agen pelaksana ia mengatakan

“ kami sebagai agen pelaksana atau agen E-Warung itu kan diberi fasilitas sama BRI berupa bentuk mesin mini ATM, peran kami sebagai agen pelaksana itu untuk mempermudah para KPM pemilik kartu merah putih untuk bisa mencairkan bantuannya. tapi kita di desa P.U.T ini hanya ada satu agen pelaksana yaitu disini, mbak merasa kalau fasilitas agen pelaksana ini kurang memadai kadang tu kami sering kehabisan stok barang karena para KPM yang mencairkan bantuan disini lebih banyak dari pada stok yang kami punya. Kalo menurut mbak fasilitas agen e-warung disini masih sangat kurang kasian dengan para KPM yang sudah datang tapi stok barang nya sudah habis jadi mereka harus menunggu satu sampai dua hari atau mereka harus mencairkan bantuannya didesa tetangga yang memiliki jarak cukup jauh” **(wawancara dengan pemilik E-Warung dengan mbak SD pada tanggal 22 agustus 2023, pukul 09:30 Wib dirumah agen E-warung desa Padang Ulak Tanjung)**

Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dilokasi penelitian ibu RT (umur 53 tahun), sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) ia mengatakan

“tempat kami ngambil bantuannya tu kurang apalagi didesa P.U.T ni Cuma ada satu yaitu ditempat mbak saidiah kadang pas dikasih tau bantuan dicairkan kami datang tapi pas disitu tau-taunya beras nya habis jadi kami nunggu dulu baru bisa mencairkan bantuan tu dan kalo ndak hari itu juga ngambil bantuannya harus pergi dulu ke desa tetangga.” **Wawancara dengan penerima bantuan (KPM) dengan ibu RT pada tanggal 26 agustus 2023 pukul 14:30 Wib dirumah ibu RT desa padang ulak tanjung)**

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti kelokasi penelitian dan hasil wawancara dengan agen pelaksana program BPNT dan KPM (keluarga penerima manfaat) tampak dalam sarana dan prasarannya belum memadai atau masih kurang fasilitas sehingga para KPM (keluarga penerima manfaat) masih harus menunggu satu sampai dua hari saat pencairan bantuan.

2.Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan. Maksimal atau tidaknya sebuah kebijakan implementasi itu juga ditentukan oleh sikap pelaksana dan pemerintah setempat, adanya sebuah dukungan yang diberikan pemerintah ataupun tingkat kemauan yang tinggi yang dimiliki oleh pihak pelaksana itu akan membantu memaksimalkan proses berjalannya sebuah pelaksanaan. Proses penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) sangat dibutuhkan pelayanan yang baik dan sikap yang ramah dari pihak pelaksana kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam hal ini adalah masyarakat miskin yang menjadi peserta dalam program BPNT.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti kelokasi penelitian tampak bahwa Disposisi atau sikap pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) khususnya di desa Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik.

Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dilokasi penelitian ibu MS (umur 33 tahun), selaku pendamping program BPNT ia mengatakan

“ pelaksanaan BPNT ini kan satu kecamatan, pendamping berhubungan dengan kecamatan, E-Warung, KPM, sama kemesos juga. Mengawasi jalannya proses pelaksanaan BPNT, melaporkan KPM yang sudah dan belum mencairkan BPNT, melihat dan menerima keluhan dan masukan dari para KPM yang mempunyai masalah terkait jalannya program BPNT, memberikan informasi dan sosialisasi terbaru terkait jalannya program, menerima saran dan masukkan agar pelaksanaan program bantuan pangan ini berjalan baik dan efektif.” **(Hasil Wawancara dengan ibu MS pada tanggal 21 agustus 2023. Pukul 13: 45 Wib di desa padang ulak tanjung).**

Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dilokasi penelitian ibu LZ (umur 37 tahun), selaku Sekretaris desa Padang Ulak tanjung ia mengatakan

“untuk aparat desa /kelurahan sangat menyambut baik akan bantuan yang diberikan dari pihak kemensos ini, kami kan yang mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tapi pada pelaksanaannya tidak semua program itu terlaksana dengan baik contohnya dek pada saat pelaksanaan program BPNT ini terjadi kendala atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat pelaksanaan misalnya ada bantuannya yang belum cair atau bantuannya tidak cair sama sekali dan kartu KKS nya itu hilang atau rusak maka kami selaku pemerintah desa itu dengan sigap melaporkan dan berkoordinasi terkait masalah yang di sampaikan para KPM kepada pendamping.” **(Hasil wawancara dengan Sekretaris desa Ibu LZ pada tanggal 21 agustus 2023, pukul 11:30 Wib di kantor desa Padang Ulak Tanjung)**

Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dilokasi penelitian bapak IH (umur 53 tahun), selaku pemerintah desa Padang Ulak tanjung ia mengatakan

“ Pastiya kami juga ikut turun langsung akan jalannya bantuan ini kita melihat kendala dan keluhan dari masyarakat terkait jalannya program, dan menerima kalau ada masyarakat yang datang kesini /kantor desa karena dia tidak mendapatkan bantuannya maka kami memberi solusi akan masalah yang dihadapi masyarakat dan juga kita akan melaporkan setiap hal yang berkaitan dengan program ini kepada pihak dinas terkait akan keluhan dan kendala yang dihadapi para KPM.” **(Hasil wawancara dengan pemerintah desa bapak IH pada tanggal 21 agustus 2023, pukul 11:45 Wib di kantor desa Padang Ulak Tanjung)**

Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dilokasi penelitian di warung agen pelaksana/E-Warung Mbak SD (umur 28 tahun), selaku agen pelaksana ia mengatakan

“KPM nya langsung datang ke e-warung sembari membawa kartu ATM nya terlebih dahulu kita cek kendala yang dihadapi tu kadang pas saat pencairan ada KPM yang uangnya belum cair atau bertahap cair nya makanya dibawak dulu kartu nya kita cek ada saldonya kita print saldonya sekian misalnya cairnya sebulan atau dua bulan yang mana sebulannya itu 200, sudah dikasih

tau bahwa saldonya ada dan beras telur ada kita tawarkan terlebih dahulu mau diambil sekarang atau nanti dan kendalanya yang dihadapi itu kadang stok barang nya habis itu dari kita nya sebagai agen pelaksana tapi kalo dari KPM itu ada yang belum cair atau saldonya kosong bantuannya maka kami sebagai pemilik E-warung itu Cuma bisa melaporkan aja ke dinas sosialnya dan kita beri tahu apa saja yang akan dibawa untuk pergi ke dinas sosialnya biasanya membawa KK, KTP, dan kartu merah putih (KKS). ” (**wawancara dengan pemilik E-Warung dengan mbak SD pada tanggal 22 agustus 2023, pukul 09:30 Wib dirumah agen E-warung desa Padang Ulak Tanjung**)

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti kelokasi penelitian dan hasil wawancara dengan agen pelaksana program BPNT dan Pemerintah Desa tampak Disposisi atau Sikap pelaksana BPNT sudah direalisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dukungan dari para pelaksana ataupun pemerintah itu sudah dirasakan oleh KPM didesa padang ulak tanjung. Dalam proses penyaluran BPNT semua pihak ikut serta dalam memantau jalannya proses penyaluran tersebut. Hanya saja terdapat pelaksana yang tidak ramah dalam melayani masyarakat.

3.Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Struktur birokrasi menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan ini memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dilokasi penelitian ibu MS (umur 33 tahun), selaku pendamping program BPNT ia mengatakan

“ seluruh perangkat desa itu punya peran dan tugasnya masing-masing. Pertama Perangkat desa harus bisa mengelolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, kedua perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait bantuan yang disalurkan, dan harus bisa memberikan layanan yang baik untuk kendala/keperluan warganya.” (**Hasil wawancara dengan Sekretaris desa Ibu LZ pada tanggal 21 agustus 2023, pukul 11:30 Wib di kantor desa Padang Ulak Tanjung**)

Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dikantor desa Padang Ulak tanjung bapak TD (umur 46 tahun), yang berasal dari perangkat desa selaku KASI KESOS Padang Ulak tanjung ia mengatakan

“ para perangkat desa itu mempunyai tugas dan perannya masing-masing contohnya sekretaris desa itu mempunyai perang untuk mendata dan mencatat hasil keputusan, melaporkan apa yang ditemui dilapangan, dan masih banyak lagi. Seedangkan tugas saya sebagai kasi kesos yaitu mendata secara langsung kelapangan akan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan kemudian melaporkan hasil temuan kepada sekretaris dan tugas – tugasnya sudah terbagi, tapi walaupun sudah terbagi kita juga saling bantu membantu.” (**hasil wawancara dengan bapak TD pada tanggal 21 agustus 2023. Pukul 11.00 Wib dikantor desa Padang Ulak tanjung**)

Hal ini dibenarkan oleh informan peneliti yang peneliti temui dilokasi penelitian ibu MS (umur 33 tahun), selaku pendamping program BPNT ia mengatakan

“peran pendamping itu banyak ya dek, sebelum saya ngejelasin peran pendamping, saya jelasin dulu pertama pendamping ini bertanggung jawab atas pelaksanaan BPNT satu kecamatan. Tugas pendamping ini berkoordinasi sama setiap pihak yang terlibat didalam BPNT, mengawasi prosesnya, melaporkan KPM yang sudah mencairkan atau belum, KPM mempunyai masalah, memberikan informasi terbaru setiap ada pencairan, evaluasi agen-agen E-Warung dalam melayani KPM, memotivasi KPM untuk segera mencairkan jangan disimpan atau ditahan bantuannya, memberikan sosialisasi yang menyeluruh kepada semua pihak, melaporkan kejadian – kejadian yang dialami selama pelaksanaan ke kemensos melalui aplikasi SIKS-NG dan diuraikan dalam bentuk laporan tertulis.” **(Hasil Wawancara dengan ibu MS pada tanggal 21 agustus 2023. Pukul 13: 45 Wib di desa padang ulak tanjung).**

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti kelokasi penelitian dan hasil wawancara dengan agen pelaksana program BPNT dan Pemerintah Desa tampak struktur Birokrasi dalam program BPNT sudah baik. Karena sudah menjalankan standar SOP (standar oprasional prosedur) yang baik. Dalam hal pelaksanaan, melalui struktur birokrasi yang jelas maka SOP akan terlaksana dengan baik. Adapun pada proses pelaksanaan penyaluran program BPNT didesa padang ulak tanjung, semua pihak ikut serta dalam membantu berjalannya penyaluran tersebut baik dari pihak pemerintah setempat, tim koordinasi dan agen pelaksana. Semua pihak sudah menjalankan tugasnya mesing-masing berdasarkan aturan yang ada dan saling menjalin komunikasi terkait proses penyaluran BPNT di desa padang ulak tanjung.

PENUTUP

Kesimpulan

Proses pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui metode E-Warung dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Ulak Tanjung kecamatan talang empat kabupaten Bengkulu Tengah, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa proses pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui metode E-Warung dalam menanggulangi kemiskinan sudah dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan aturan yang dilihat dari aspek komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian kelokasi penelitian dan wawancara dengan para KPM (keluarga penerima manfaat). Masih ada kendala yang dihadapi pada tahap komunikasi atau sosialisasi karena masyarakat masih perlu adanya pengawasan sehingga masih ada masyarakat yang belum megetahui tentang mekanisme pelaksanaan bantuan. Dan sarana dan prasarana didesa padang ulak tanjung yang digunakan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (bpnt) masih sangat kurang serta jarak antar rumah KPM dan E-Warung jauh sehingga menyebabkan KPM merasa kesulitan pada saat pengambilan bantuan.

Saran

Pemerintah, masyarakat dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk melakukan pertemuan setiap bulannya dengan keluarga penerima manfaat (KPM) guna untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat

penerima bantuan lebih memahami tentang prosedur pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT). Dan perlu juga ditambahkan pada sarana prasarana agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam proses pengambilan bantuan sehingga bisa menanggulangi kemiskinan yang ada di desa padang ulak tanjung kecamatan talang empat kabupaten Bengkulu tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharto. 2005:156 *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, yogyakarta
- Undang – undang 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 *tentang fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh negara*
- Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Megawati Suci (2020). *Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan dikabupaten mojokerto. 1 vol 2 no (3)*
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.
- Edward III, 1980. *Direc and indirec impact on implementation*.
- Nurfalia (2020:20). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dengan Metode E-warung. Evaluasi, Pelaksanaan Program BPNT, Kemiskinan. I vol 2 No 3*.
- Reobyantho haryati (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non- Tunai (Bpnt) dengan Metode E-Warung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro)*. 2(2).
- Kecamatan, T., & Kota, W. (2020). *Evaluasi program bantuan pangan non tunai kepada keluarga penerima manfaat di kelurahan mahakeret barat dan kelurahan mahakeret timur kecamatan wenang kota manado*. 4(4), 1–9.
- PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) ANTARA HARAPAN DENGAN KENYATAAN (*Studi Pada Masyarakat Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara*) Skripsi WULAN SEPTIRIANA Prodi : *Pemikiran Politik Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN*. (2022).
- Publik, A., Sosial, F. I., & Gorontalo, U. N. (2023). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara , Kecamatan Kota Timur*. 2(8), 3362–3372.
- Rusli dkk, 1995:51-52 *Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Djaenal Rifani Dkk, 2021, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan*. Studi Ilmu Politik Vol 1 No 2.
- Kawung M Alive DKK, 2020, *Evaluasi Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT)Kepada Keluarga Penerima Manfaat dikelurahan Mahakare kota Manado*. Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 4
- Mukminatul Diah, 2020, *Analisi Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Manajemen Bisnis Vol 2 No 1
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif dan kualitatif*, bandung